

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah sesuai prinsip yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan tingkat pemerintahan pusat pada Peraturan MK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pertanggungjawaban dan penyelenggaraan laporan keuangan pemerintah yang baik terdapat pula pada UU No. 17 Th 2003 mengenai Keuangan Negara dan UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintah Daerah (Bayu, 2015).

Laporan keuangan adalah media untuk sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah bertanggungjawab menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki karakteristik ; Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Apabila informasi yang terdapat pada Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki semua karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, hal ini menunjukkan pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Bayu, 2015).

Laporan keuangan ialah produk dari hasil pada disiplin bidang ilmu akuntansi. Laporan keuangan berkualitas dapat dihasilkan dari tingkat kompetensi yang ada pada SDM bidang akuntansi. Pada entitas pemerintahan, skill SDM yang berkompeten serta paham akan bidang akuntansi pemerintahan keuangan daerah juga organisasional yang mencakup pemerintah dibutuhkan untuk mendapat hasil kualitas laporan keuangan daerah. Studi penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Andini (2015) bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Realita yang terjadi bahwa laporan keuangan pada entitas pemerintahan daerah belum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia masih banyak laporan keuangan entitas pemerintah yang belum memenuhi syarat yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No.71 Th 2010 dan Peraturan MK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan pusat. Sedangkan akuntansi pemerintahan daerah diatur dalam PP No.58 Th 2005 dan didukung oleh Peraturan Menteri dalam negeri No.59 Th 2007 dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Bayu, 2015). Penelitian yang diteliti oleh Bayu (2015) menunjukkan hasil dari penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berikut hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pada Semester 1 Tahun 2017 :

**Tabel 1.1**

Opini pemeriksaan Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2017

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPP	1	0%	0	100%	0	0%	0	0%	1
LKKL	74	84%	8	9%	0	0%	6	6%	88
LKPD	375	70%	139	26%	0	0%	23	4%	537
LK Badan Lainnya	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	6

Sumber : BPK (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017)

Keterangan : LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat)

LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga)

LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

TW (Tidak Wajar)

TMP (Tidak Memberi Pendapat)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah pusat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK. Hal ini menunjukkan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah yang sebelumnya memperoleh opini WDP dari BPK. Perolehan Peningkatan Pemerintah Pusat juga disusul oleh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sebelumnya pada Semester 1 tahun

2016 sebanyak 187 LKPD mendapat opini WDP dan hanya 312 LKPD mendapatkan opini WTP, namun pada semester 1 tahun 2017 ini kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meningkat dengan mendapatkan 372 LKPD mendapatkan WTP dan 139 LKPD mendapatkan WDP oleh BPK. Hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

Dari mulai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Laporan IHPS 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa BPK memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini meningkat dengan ditunjukkannya Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017 bahwa Pemerintah Pusat telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan WDP jadi WTP dikarenakan Pemerintah Pusat mengevaluasi perolehan dari pemeriksaan BPK atas LKPP pada IHPS 1 Tahun 2016 yang terkecuali, yaitu diantaranya : 1. diterbitkannya aturan terkait perlakuan akuntansi dalam transaksi perjanjian jual beli pada tenaga listrik, 2. ditetapkan dana yang terkait penetapan harga jual eceran BBM, 3. menjadikan integrasinya *single database* , (4) penyempurnaan tentang sistem akuntansi pusat dan aturan pada pengelolaan saldo anggaran lebih (SAL).

Selanjutnya pada Pemerintah Daerah, IHPS 1 tahun 2016 sebanyak 312 LKPD mendapat WTP, 187 LKPD mendapat WDP, 4 LKPD mendapat TW dan sebanyak 30 LKPD mendapat TMP. Kini hal tersebut meningkat pada laporan IHPS 1 tahun 2017 dengan sebanyak 375 LKPD mendapat WTP, 139 LKPD mendapat WDP, dan 23 LKPD mendapat TMP. Peningkatan LKPD ini dihasilkan

dari upaya yang dilakukan oleh pemda atas perbaikan kelemahan yang ada pada IHPS 1 th 2016, diantaranya yaitu : (1) pada kas, ditelusurinya dokumen pendukung serta penyajian saldo kas dana BOS di neraca terletak pada akun kas lain, dilakukannya rekonsiliasi kas lain yang bersumber pada dana BOS, dan dilakukan evaluasi terkait penyajian kas dari laporan keuangan. (2) pada persediaan, pencatatan terhadap mutasi persediaan dan pelaporan berupa barang yang telah habis pakai dan dilakukannya *stock opname* terhadap persediaan dengan pelengkap kertas kerja dan memadainya laporan terhadap mutasi pada persediaan. (3) pada asset tetap, perolehan dana bos dicatat pada asset tetap dan *black grant*, melakukan inventarisasi atau sensus, asset tetap di kapitalisasi dan dinilai kembali secara keseluruhan, melengkapi perincian informasi terhadap asset tetap dan penyusutan asset tetap dihitung ulang sesuai pada kebijakan akuntansi.

Terdapat 162 LKPD belum memperoleh opini WTP dikarenakan adanya ketidaksesuaian penyajian akun – akun dalam LK yang telah diatur oleh SAP. Penyajian LK yang tidak sesuai dengan SAP seperti tidak sesuainya penyajian belanja modal, beban operasi-LO, belanja operasi, asset lancar, asset tetap, asset lainnya, investasi jangka panjang, kewajiban jangka pendek. Terdapat tiga akun terbesar permasalahannya yang mempengaruhi kewajaran dalam penyajian LKPD di IHPS 1 tahun 2017 ialah : (1) asset lancar terdapat di 87 pemda, yaitu kas dipergunakan dalam kepentingan pribadi bendahara, kas tekor, belum terdapatnya penyajian piutang sebanyak nilai bersih yang bias direalisasi, dan pada nilai persediaan belum disajikan berdasarkan *stock opname*. (2) asset tetap di 136 pemda, belum dilakukannya pencatatan atau terjadinya pencatatan yang tidak

akurat serta tidak bisa diidentifikasi keberadaannya seperti halnya asset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung, mesin dan peralatan, irigrasi dan jaringan. (3) belanja operasional di 48 pemda, diantaranya identifikasi belanja fiktif, belanja barang tidak sesuai pada kebutuhan, belanja hibah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa ditelusuri.

Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) memberi opini WTP pada 375 LKPD termasuk laporan keuangan Kabupaten Demak. berikut hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012-2016.

**Tabel 1.2**

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Demak

Tahun 2012-2016

No	Tahun	Opini BPK
1	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: [www.semarang.bpk.go.id](http://www.semarang.bpk.go.id)

Kabupaten Demak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK yang sebelumnya 5 tahun berturut-turut mendapatkan opini WDP. Kemajuan yang dilakukan Kabupaten Demak agar memperoleh opini WTP dikarenakan dilakukannya perbaikan terhadap kelemahan yang ada pada tahun 2015

diantaranya melakukan pengoreksian yang dibutuhkan terhadap penyajian kas dalam laporan keuangan, evaluasi seluruh piutang atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan ditelusurinya per Nomor Objek Pajak (NOP) dan wajib pajak, diubahnya system pengelolaan PBB-P2 yang bisa terkoneksi oleh bank hingga dilakukan atas penyisihan piutang pokok retribusi, dan nilai investasi permanen disajikan pada BUMD berdasarkan dari nilai ekuitas bersih pada laporan keuangan tahun 2016 dan evaluasi penilaian terhadap asset yang ada pada BUMD.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Fahmi, 2013). Pertanggungjawaban entitas pemerintah dalam kinerja keuangan kepada public berupa media dengan berbentuk laporan keuangan. Penelitian yang diteliti oleh Dian (2014) mendapatkan hasil bahwa pemahaman akuntansi begitu berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Lasoma (2013) dalam penelitiannya Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Selaras Rukmi (2013) dalam penelitiannya pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi serta standar akuntansi pemerintahan mengalami pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Dan

didukung oleh Bayu (2015) dalam penelitiannya bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Zuliarti (2012) dalam penelitiannya bahwa pengaruh kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan Ihsanti (2014), Andini (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem keuangan daerah pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selaras dengan Ruri (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memberikan hasil sumber daya manusia pengaruh positif signifikan.

Nisa (2016) dalam penelitiannya pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus di DPKAD Kota Bandung).

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ruri Windiastuti (2013) tentang pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Citra Khiyarotun Nisa (2016) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. dalam pengkajian yang penulis tulis terdapat beberapa

perbedaan, pada jurnal ruri hanya memiliki 2 variabel independen sedangkan pada citra terdapat 3 variabel independen. Pada penelitian ini penulis memilih tempat penelitian di seluruh dinas yang berada di Demak, perbedaan selanjutnya terdapat pada waktu penelitian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Bagaimana pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .
4. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Untuk menganalisis pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak penulis dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

### **1.4.1 manfaat Teoritis**

#### 1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### 2. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mereka yang tertarik maupun ingin mengetahui kasus – kasus yang terkait dengan pengauditan keuangan. Penelitian ini juga bisa dijadikan bahan salah satu sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

#### 3. Bagi Institusi Ekonomi

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan dalam bidang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta memberikan manfaat yang lebih dalam dunia akademik ekonomi.

#### 5. Bagi Pihak Dinas

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### 1. Bagi Responden

Diharapkan penelitian ini menjadi manfaat untuk responden yang berupa memberikan masukan dan saran terkait factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan hingga apa yang di harapkan peneliti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.